

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Akuntansi sektor publik

1.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan pemerintah yang dimaksud dapat mencakup pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Halim, 2014:20). Sektor publik adalah pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dengan demikian beralasan bahwa istilah sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi, atau pemerintah (Halim, 2014:9).

Menurut Mardiasmo (2019:29) dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintahan daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus di operasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Sektor Publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan historis yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang dan definisi. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan

pemerintahan, yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

1.1.1.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Menurut Mardiasmo (2016:67) teori memiliki tiga karakteristik dasar yaitu : (1) kemampuan untuk menerangkan dan menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*), (2) kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*), (3) kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

Menurut Santoso (2018:20) pada dasarnya terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu: 1) untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, 2) mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan 3) memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Pengembangan teori sektor publik untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (*reliable*).

1.1.1.3 Indikator Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Kristiyani dan Hamidah (2020:300) indikator penerapan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Publik

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang.

2. Penganggaran Publik

Penganggaran Publik Anggaran menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

3. Realisasi Anggaran Publik

Setelah proses penganggaran selesai, anggaran itu kemudian direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi publik. yang Dengan kata lain, realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan barang/jasa dengan kriteria tepat harga, tepat (sesuai) kualitas, tepat kuantitas (volume), rekanan dan cara pengadaan yang tepat, dan kesepakatan lainnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sehingga pengguna dapat memanfaatkan barang/jasa dimaksud.

5. Pelaporan Keuangan Publik

Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen, mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis serta memungkinkan untuk pihak luar mengetahui

biaya atas barang dan jasa yang telah diterima dan mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi.

6. Audit Sektor Publik

Audit sektor publik adalah proses audit yang ditujukan untuk memeriksa dan memvalidasi laporan keuangan yang dikurasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

7. Pertanggung Jawaban Publik

Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk di dalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

1.1.1.4 Kendala Akuntansi Sektor Publik

Menurut Santoso(2018:20) untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapatdiandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik.Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialistik.

1. Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan.Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi *stakeholder* organisasi.

2. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk rnenghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut.

3. Daya Banding

Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain sejenisnya. Dengan demikian daya banding berarti laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

4. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta untuk menghindan tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan.

5. Ekonomis dalam Penyajian Laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya.Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan dapat berarti bahwa manfaat yang diperoleh hams lebih besar dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

6. Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif (*subjective judgment*), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi.

Menurut Santoso (2018:22) Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian *intern* atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan.

Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntan, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar

akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri (Santoso, 2018:23).

1.1.2 Sistem Pengendalian Internal

1.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2018:163) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Romney dan Steinbart (2019 : 222) mendefinisikan pengendalian internal sebagai sebuah proses yang diimplementasikan oleh segenap direksi, manajemen, dan semua karyawan yang terkait dengan peraturan perusahaan setempat untuk menyajikan jaminan yang layak.

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjajanto (2015:18) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk

mengamankan asset perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Menurut *Committee of sponsoring* (COSO) dalam Boynton dan Johnson (2016:23), definisi dari pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilakukan oleh direksi perusahaan dan pegawai lain untuk menyediakan keyakinan yang memadai mengenai hal-hal berikut : (1) keandalan pelaporan keuangan. (2) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (3) efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pengertian sistem pengendalian internal adalah serangkaian proses untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam suatu perusahaan telah berjalan efektif dan efisien dan tidak ada prosedur yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehingga merugikan perusahaan dan menyebabkan tujuan jangka panjang perusahaan tidak dapat tercapai.

1.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2018:163) tujuan sistem pengendalian intern adalah: (1) Menjaga kekayaan organisasi. (2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. (3) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua macam:

1. Pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*).

Merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

2. Pengendalian intern administratif (*internal administrative control*).

Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

1.1.2.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2018:164), menyatakan ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menciptakan pengendalian yang baik.

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran dan departemen keuangan dan umum. Departemen ini kemudian terbagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut, oleh karena itu

dalam organisasi harus dibuat system yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di pihak lain, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan yang tinggi. Dengan demikian system otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
 - a. Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat yang memeberikan otorisasi terlaksananya transaksi.
 - b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur.
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan orang atau unit organisasi lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya. Manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang menduduki jabatan tersebut.
 - b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

1.1.2.4 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) indikator sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap topmanajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas.

2. Penilaian Risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat

menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif.

4. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal.

5. Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, perbandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Menurut Sawyer's dalam Sari (2020:10) indikator sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Organisasi

Struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

2. Kebijakan

Rangkaian konsep atau aturan yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam melaksanakan program yang didasarkan pada suatu

ketentuan dari pimpinan untuk mewujudkan tujuan implementasi berjalan dengan baik.

3. Prosedur

Suatu urutan-urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin keseragaman transaksi yang terjadi secara berulang.

4. Penganggaran

Rencana keuangan untuk masa depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan indikator sistem pengendalian internal diatas dan keterbatasan peneliti maka peneliti menggunakan indikator menurut Sawyer's dalam Sari (2020:10) yaitu organisasi, kebijakan, prosedur dan penganggaran.

1.1.3 Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

1.1.3.1 Pengertian Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja adalah hasil kerja yang menggambarkan tingkat pencapaian dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mewujudkan misi, visi, sasaran dan tujuan organisasi (Sumartono, 2017:9). Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ialah suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah agar mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan tanggungjawab

inikemudian dipublikasikan dengan format laporan yang disebut LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.1.3.2 Indikator Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Santoso (2018:20) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus berdasar pada indikator-indikator tertentu. Indikator kinerja menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberi gambaran mengenai tingkatpencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik bersifat positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

1.2 Teori Hubungan Antar Variabel

1.2.1 Hubungan Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan pemerintah yang dimaksud dapat mencakup pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Halim, 2014:20). Jika penerapatan akuntansi sektor publik dapat terlaksana dengan baik maka akuntansi kinerja instansi pemerintah akan meningkat.

1.2.2 Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mulyadi (2018:163) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dalam bekerja jika kegiatan keuangan dievaluasi dengan baik maka kinerja akuntansi pemerintah akan memiliki kinerja yang baik pula.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti Alat Analisis, Hasil Penelitian.	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Wulan Sari	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi. 2020	Variabel X Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal variabel Y Kinerja Pemerintah. Alat analisis yang digunakan pengujian statistic menggunakan <i>software SmartPLS 2.0</i> . Penerapan akuntansi sektor publik meberikan pengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Besar pengaruh akuntansi terhadap kinerja mencapai nilai Koefisien Determinasi 32,6% dan pengaruh tidak langsung Akuntansi sektor publik terhadap kinerja akibat adanya hubungan dengan pengawasan internal sebesar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel X yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal ✓ Variabel Y Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian ✓ Tidak ada variabel intervening.

			12,2% maka besar pengaruhnya 44,8, namun Pengaruh nya tidak mencapai 100% karena masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja yang peneliti tidak teliti.		
2	Urip Santoso	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah <i>Fraud</i> . Jurnal Administrasi Bisnis (2008), Vol.4, No.1: hal. 14–33.	Variabel X Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan variabel Y Kinerja Instansi Pemerintah variabel Z Mencegah <i>Fraud</i> . Alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Sedangkan secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel X yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik ✓ Variabel Y Kinerja Instansi Pemerintah ✓ Variabel intervening Mencegah <i>Fraud</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian

			instansi pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> baik secara partial maupun secara bersama-sama.		
3	Dian Kristiyani Hamidah	Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah <i>Fraud</i> pada Sektor Publik Di Era Digital. Vol. 22, No. 2, Des 2020, Hlm. 289-304.	Variabel model penerapan Akuntansi Sektor Publik untuk mencegah <i>fraud</i> . Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik dapat mencegah terjadinya <i>fraud</i> pada sektor publik di era digital jika dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi <i>fraud</i> , seperti <i>performance accountability</i> , dan melakukan strategi teknis, pendekatan dua paradigma, dan strategi preventif.	✓ Variabel X yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik ✓ Variabel Y Mencegah <i>Fraud</i> .	✓ Alat Analisis Penelitian ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian
4	Dewi	Faktor-Faktor Yang	Variabel penelitian yaitu	✓ Variabel X yaitu	✓ Variabel Y

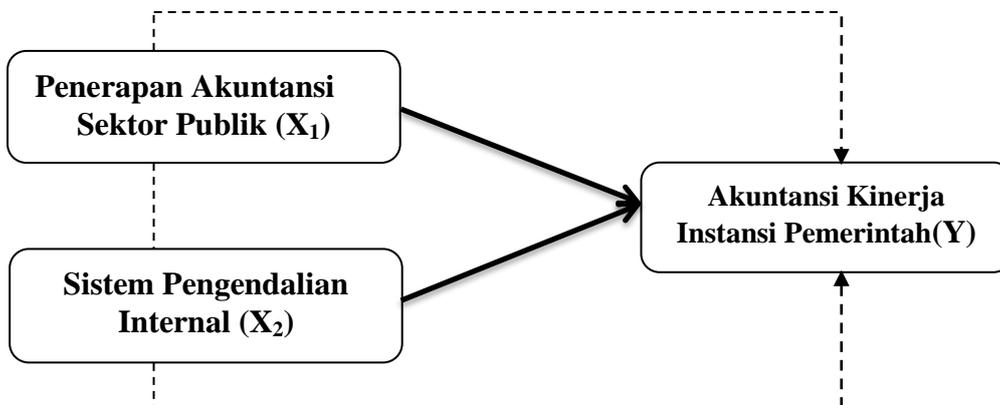
Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir.	Mempengaruhi Pencegahan <i>Fraud</i> Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Opd Pemerintah Provinsi Riau), Vol. 5 No. 1, Maret 2021 (71-86).	Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Risiko terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan <i>Partial Least Square</i> (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko terhadap pencegahan <i>fraud</i> , terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan <i>fraud</i> melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan tidak terdapat pengaruh	Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan.	Pencegahan <i>Fraud</i> ✓ Variabel intervening Kinerja Instansi Pemerintah ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian
--	--	---	--	--

			manajemen risiko terhadap pencegahan <i>fraud</i> melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.		
5	Bambang Pamungkas	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Volume 12 No. 2, Oktober 2012	Variabel penelitian X Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan, variabel Y Kualitas Laporan Keuangan variabel Z Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian dilakukan dengan metode survey. Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	✓ Variabel X yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian ✓ Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan ✓ Variabel Z Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ✓ Alat analisis

baik secara parsial maupun
simultan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada judul yang penulis ajukan yaitu maka variabel dependen yaitu akuntansi sektor publik (X_1) dan sistem pengendalian internal (X_2), variabel independen yaitu akuntansi kinerja instansi pemerintah (Y). Dengan demikian, kerangka berpikir dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Keterangan:

- Secara Parsial ————
- Secara Simultan - - - - -

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Arikunto (2020:110) hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah(studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu)secara Parsial maupun simultan.

